

AUDIT CITRA PEMERINTAHAN PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO DAN WAKIL PRESIDEN JUSUF KALLA

Dyah Pitaloka dan Agus Naryoso¹

Bayu Vita Al Hayuantana²

Abstract :

Politics, as communication, is a process, and just like communication it involves an inclusive conversation through the exchange of symbols, pictures, body languages, attitudes, manners, etc. Politics is not simply a form of communication, but more it is related to political experience that allow everybody to communicate with others. Political words creates image about object and the condition within conflict and social collaboration, therefore political conversation become a very important point in developing political image. Through the strong political image, politicians and government officers could reassure and motivate people to get involve in the activities and decision making process.

Key words : image, political communication, media effect

I. PENDAHULUAN

Citra dalam konteks politik mempunyai peranan yang sangat penting, citra sendiri bagi organisasi politik atau individu yang terlibat politik akan sangat menentukan eksistensi atau keberadaan di dunia politik, dengan citra yang baik seseorang atau organisasi politik dapat meraih dukungan dan komitmen publik yang luas. Hal tersebut menjadi sangat penting ketika komitmen atau dukungan publik tersebut pada akhirnya akan memberi pengaruh sangat tinggi terhadap produktifitas. Citra atau image berbasis pada kekuatan penafsiran suatu subjek, dimana baik buruknya atau positif dan negatifnya penilaian tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor mulai dari pengalaman individual dan stimuli inderawi.

Berbicara mengenai citra pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla (SBY-JK) akan menyajikan berbagai macam penilaian yang berbeda-beda. Ada sebagian dari kelompok masyarakat mempunyai pandangan yang positif tetapi juga tidak sedikit yang mempunyai penilaian negatif. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai peristiwa yang pernah dilihat dan didengar, serta pengalaman-pengalaman hasil interaksi langsung atau tidak langsung

pemerintahan SBY-JK dengan masyarakat dan jajaran pemerintahannya.

Proses interaksi tidak langsung masyarakat dengan pemerintahan SBY-JK dirasakan dari berbagai macam kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang menyentuh kehidupan langsung, dalam kasus terdapat beberapa kebijakan yang memberi keuntungan dan berpihak langsung pada kepentingan rakyat, tetapi juga ada beberapa kebijakan yang tidak menyentuh langsung kepentingan masyarakat bahkan tidak memberikan keuntungan apapun. Kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat kerap kali menuai kiritik dan respon yang besar dari masyarakat, terdapat beberapa kelompok yang mengajukan berbagai macam protes dan keberatan atas kebijakan tersebut, protes sebagai bagian dari ekspresi kekecewaan tersebut merupakan bentuk penolakan nyata dari kelompok masyarakat. Banyak faktor yang menyebabkan penolakan yang kerap kali juga disertai dengan amarah bahkan tindakan anarkis yang tidak terkontrol, kemarahan tersebut dilampiaskan melalui banyak cara yang intinya agar dapat menarik perhatian publik dalam skala yang lebih luas, dalam konteks public relations hal tersebut menjadi hal yang sangat tidak menguntungkan bagi lembaga kepresidenan ke depan.

1) Staff Pengajar Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UNDIP
2) Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UNDIP

Kasus Lapindo Brantas contohnya merupakan satu ujian dalam pemerintahan SBY-JK untuk membuktikan respon proaktif mereka terhadap bencana alam nasional yang terus menuai kritis dan protes seputar kecekatan dan kesigapan pemerintah Indonesia dalam menangani bencana tersebut, berikut ganti rugi atas hilangnya wilayah, kerusakan sarana dan prasarana, serta hancurnya tempat tinggal masyarakat. Kekecawaan dan respon bernada tidak positif tersebut lebih banyak disebabkan karena lambannya reaksi pemerintah SBY-JK terhadap problematika yang dimunculkan dari kejadian tersebut. Substansi permasalahan terletak kepada rendahnya kepedulian pemerintah untuk memberikan advokasi dan bantuan hukum kepada warga yang menuntut hak atas lahan dan rumah mereka yang tergenang luapan lumpur lapindo. Kondisi semakin buruk ketika beberapa pihak menuding keterlibatan menko kesra dibalik kejadian tersebut yang mengakibatkan pemerintah tidak memiliki cukup keberanian untuk menuntaskan kasus tersebut secara hukum.

II. PEMBAHASAN

Peran media massa dalam pembentukan sebuah citra sangat dominan, terlebih jika citra tersebut menyangkut sosok atau individu yang dekat dengan proses pengambilan keputusan publik (*public policy*), dalam hal ini pemerintah sebuah negara. Media massa pada dasarnya punya kekuatan untuk membentuk dan mempengaruhi opini khalayak, karena sejalan dengan yang dikemukakan *McComb* dalam teori *agenda settingnya* bahwa isu-isu yang dianggap penting oleh media akan juga dianggap penting oleh publik.

Pemberitaan yang bergulir seputar pemerintahan SBY-JK, kebijakan-kebijakan kontroversial mereka, reshuffle kabinet, sampai pada ketidakharmonisan SBY-JK dalam menjalankan roda pemerintahan adalah pesan yang dikonsumsi oleh masyarakat yang kemudian membentuk opini dominan di kepala mereka yang selanjutnya menciptakan citra tertentu dalam benak mereka, atau yang disebut oleh *Walter Lippman* (1965) sebagai *'picture in our head'*.

Citra, dalam buku "Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek" (*Dan Nimmo, 1999*) merupakan kecenderungan yang tersusun dari pikiran, perasaan dan kemauan. Citra selalu berubah seiring dengan berubahnya pengalaman. Apa yang dicitrakan orang itu membimbing upaya perasaan dan harapan mereka, bukan prestasi dan hasil

mereka. Citra juga menunjukkan seluruh informasi tentang dunia yang telah diolah, diorganisasikan, dan disampaikan individu (*Roberts, 1978*), dengan kata lain citra adalah gambaran tentang realitas dan tidak harus sesuai dengan realitas.

Fokus dalam uraian kali ini adalah citra lembaga, yaitu lembaga pemerintahan yang dipimpin oleh presiden *Susilo Bambang Yudhoyono* dan Wakil Presiden *Jusuf Kalla*. Citra lembaga merupakan citra organisasi secara keseluruhan, jadi bukan hanya citra atas produk dan pelayanannya saja. Citra lembaga sangat penting karena menentukan tingkat dukungan masyarakat pada lembaga tersebut. Dukungan tersebut juga menentukan jatuh-bangunnya lembaga tersebut. Citra lembaga akan baik bila akses informasi dan komunikasi lancar.

Citra yang terbentuk berdasarkan informasi yang diterima seseorang melalui media massa diasumsikan akan lebih kuat, dan inilah yang memang dilakukan oleh media sebagai pelaksana fungsi pengawasan atas pelaksanaan pemerintahan (*watchdog*). Bahwa masyarakat mendapatkan seluruh informasinya tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah melalui pemberitaan di media, seperti yang diungkapkan oleh *Mc Luhan* bahwa media massa menjadi perpanjangan indera kita karena realitas yang disampaikan adalah realitas yang sudah diseleksi, realitas tangan kedua (*second hand reality*) yang memberikan pengaruh dominan dalam pembentukan citra tentang realitas lingkungan sosialnya (*Mc Luhan, 1995*)

Citra tidak berada di dalam organisasi, tetapi berada dalam apa yang dimengerti oleh organisasi. Menurut *Bernstein*, dalam buku *Marketing Communication* (*Chris Fill, 2000*) citra tidak dapat dirubah begitu saja. Citra hanya dapat dirubah melalui perubahan identitas. Melalui manajemen identitas dalam organisasi dapat mempengaruhi citra yang melingkupinya. Hal-hal yang mempengaruhi baik buruknya citra antara lain :

- dinamika : pembaharuan, orientasi tujuan dan pencari perhatian
- kerjasama : ramah, disukai, mampu untuk melayani
- bisnis : bijaksana, cerdas, persuasif, terorganisir
- karakter : beretika, reputasi yang dihormati
- sukses : penampilan keuangan, percaya diri
- penarikan mundur : penuh rahasia, kecurigaan

Citra lembaga merupakan gabungan dari citra personal dan citra majemuk karena banyak unit anggota yang tergabung dalam lembaga tersebut. Dan anggota-anggota tersebut memiliki perangai dan perilaku tersendiri. Demikian pula citra suatu lembaga pemerintahan, juga merupakan gabungan dari citra masing-masing individu yang mengisi lembaga pemerintahan tersebut. Citra positif yang dimiliki oleh lembaga tersebut akan menumbuhkan kepuasan pada masyarakat luas atas kinerja para aparat pemerintah.

Citra pemerintahan SBY-Kalla cenderung menipis. Derajat penurunan popularitas pemerintahan Presiden SBY dan Wapres Jusuf Kalla terjadi secara simultan. Parahnya, kecenderungan penurunan itu berdampak pada meningkatnya derajat pesimisme publik atas masa depan kapabilitas pemerintahan menangani persoalan bangsa, khususnya dalam soal ekonomi. Sejumlah riset menunjukkan tingkat kepercayaan publik semakin menurun. Untuk menahan meluasnya pesimisme publik, banyak usulan agar Presiden merombak kabinet secara radikal dan profesional. Karena menurut pengamat politik Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) Sukardi Rinakit, hasil survei LSI merupakan alasan kuat pendapat bahwa Presiden memang harus melakukan reshuffle kabinet secara radikal mencakup 8-10 menteri. Jika hanya sedikit menteri yang diganti, pemerintah masih akan kesulitan untuk bisa membangkitkan kembali optimisme publik.

Merosotnya popularitas Yudhoyono-Kalla ditunjukkan dengan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang disampaikan Direktur Eksekutif Saiful Mudjani, akhir Maret, dan survei Lingkaran Survei Indonesia yang disampaikan Denny JA di Jakarta, Kamis (19/4). Jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas juga menunjukkan merosotnya popularitas Presiden Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla. Jumat, 20 April 2007, tepat 30 bulan Presiden Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla memerintah. Pada Pemilu 2004, pasangan Yudhoyono-Kalla meraih dukungan 60,62 persen suara. Denny mengatakan, survei Lingkaran Survei Indonesia pada Februari yang dianalisis pada Maret dan April menunjukkan selama 2,5 tahun ini kinerja pemerintah di bidang keamanan cukup memuaskan. Tingkat kepuasan masyarakat di bidang ini mencapai 59,6 persen. Sedangkan tingkat kepuasan di bidang politik hanya 45,4 persen, ekonomi 29,7 persen, sosial 46,9 persen, penegakan hukum 47,2 persen dan hubungan luar negeri 46,4 persen. Kepercayaan publik atas kemampuan

pemerintah menangani kemiskinan dan pengangguran masing-masing hanya 26 persen dan 22,9 persen. Lebih dari 50 persen responden menyatakan Presiden tidak mampu.

Dalam bidang keamanan, pemerintahan SBY-Kalla mencatat kesuksesan yang bahkan dicatat dunia internasional. Misalnya, kasus Aceh. Meski demikian, selain keamanan, semua bidang mendapatkan rapor merah, khususnya dalam bidang ekonomi yang menembus angka di bawah 30 persen yang merupakan titik terendah atas kepuasan kinerja bidang ekonomi selama dua setengah tahun pemerintahan. Angka terendah itu disebabkan adanya ketidaksiapan pemerintah dalam mengatasi problem kemiskinan serta pengangguran yang masih belum dapat dipecahkan. Selain itu, pemerintahan SBY-Kalla mengalami degradasi politik di hadapan publik. Degradasi tersebut terjadi dalam beberapa target kinerja yang menjadi identitas pemerintahan SBY-Kalla di banding pemerintahan sebelumnya.

Misalnya, kepuasan publik atas isu yang menjadi primadona pemerintah saat ini, penanganan korupsi. Soal pemberantasan korupsi yang telah menjadi kartu truf pemerintahan, kepuasan publik pada tahun pertama pemerintahan SBY tercatat mencapai angka yang sangat tinggi, yakni 97,9 persen. Namun, kini kepuasan itu terjun bebas hingga menyentuh angka di bawah 33,3 persen. Kondisi tersebut dinilai sangat memprihatinkan, mengingat banyaknya pejabat publik sekarang yang ditangkap. Namun, itu tidak berarti akibat menguatnya wacana tebang pilih yang dipraktikkan pemerintahan SBY-Kalla. Isu tebang pilih memang sangat berpengaruh, sehingga terbentuk citra bahwa tokoh yang dikejar kasus korupsinya terutama pejabat dari kubu lawan politik. Senada dengan itu, terbentuk pula citra bahwa para menteri serta tokoh yang dekat dengan kekuasaan bebas melenggang.

Bahkan, pesimisme juga melanda sejumlah partai politik pendukung pemerintah. Misalnya, dalam konstituen Partai Demokrat, saat ini terdapat 51 persen yang menilai pemerintah tidak mampu menyelesaikan problem ekonomi. Ketidakpercayaan serupa juga ditunjukkan konstituen Partai Golkar yang mencapai 45,1 persen pada tingkat kepercayaan 27,9 persen. Situasi sosial politik yang patologis tersebut kemudian berimplikasi pada menguatnya perubahan perilaku politik publik yang mulai mendambakan tokoh pemimpin alternatif pengganti SBY-Kalla. Jika tokoh alternatif itu ada, figur tersebut akan mampu

melampaui popularitas SBY sebagai presiden mendatang. Karena belum ditemukan, saat ini SBY masih lebih populer dibandingkan tokoh mana pun di Indonesia.

Sementara itu, segmen masyarakat menengah ke bawah juga semakin tidak percaya kepada pemerintah akibat kebijakan luar negeri yang mendukung resolusi dewan keamanan PBB 1774 soal nuklir Iran. Isu Iran memang sangat populer di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Persepsi publik terhadap pemerintahan SBY akan senantiasa berbanding lurus dengan prestasi dalam kebijakan ekonomi. Meskipun kebijakan hukum dan keamanan baik, kalau kondisi ekonomi tak ada perbaikan, popularitas tetap cenderung menurun.

Mengomentari hasil survei yang menyebutkan popularitas Presiden Yudhoyono merosot, Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng dapat memahami karena survei dibuat sesaat setelah rentetan bencana dan musibah, seperti hilangnya pesawat AdamAir, gempa bumi di Sumatera Barat, longsor di Manggarai (Nusa Tenggara Timur), dan terbakarnya pesawat Garuda Indonesia Suasana hati sangat memengaruhi hasil survei, terlebih ketika survei dilakukan, harga beras naik. Dalam beberapa bulan lagi, jika suasana membaik, popularitas akan naik," ujarnya. Menurut Andi, agar lebih utuh, popularitas Presiden bisa dilihat dalam rentang waktu yang lebih panjang, misalnya dalam rentang waktu 2,5 tahun pemerintahannya. Ia mengakui popularitas Presiden berdasarkan hasil survei naik turun setiap periode survei dilakukan. "Namun, secara rata-rata masih tinggi, yaitu sekitar 61 persen," ujarnya.

Opini publik yang bergulir sangat tajam dan bahkan cenderung ekstrim seperti yang telah dikemukakan di atas menurut Dan Nimmo (1999) adalah hasil dari proses yang menghubungkan pikiran, perasaan, dan usul yang diungkapkan masyarakat terhadap sesuatu objek. Opini publik bersifat dinamis, yang berakar dari bagaimana masyarakat giat menyusun persepsi tentang gejala politik (citra politik yang muncul) dan mengungkapkan makna itu melalui kepercayaan, nilai, pengharapan, penolakan, ketidaksetujuan.

Kubu pendukung SBY tak terima bila tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah yang menurun semata-mata karena kesalahan putra Pacitan Jawa Timur itu. Para menteri asal parpol pun dinilai ikut andil menyebabkan pamor pemerintah SBY jeblok. Menurut Ruhut Sitompul, Jurubicara DPP Partai Demokrat, kesalahan jangan selalu dilimpahkan kepada SBY-JK. Namun, kita

juga harus melihat juga apakah menteri-menteri sudah bekerja dengan benar. Ia menuding menteri-menteri bekerja setengah hati dalam menjalankan program-program presiden. Akibatnya, banyak program pemerintah yang terbengkalai dan tak tertangani dengan baik.

Ketidakseriusan menteri-menteri dalam bekerja dikarenakan mereka menghadapi dualisme loyalitas. Di satu sisi, mereka harus loyal kepada presiden karena menteri adalah pembantu presiden. Namun di sisi lain, mereka juga harus loyal terhadap parpol yang mereka naungi. Kondisi ini, tak dapat dihindari karena Kabinet Indonesia Bersatu disusun dari berbagai unsur parpol yang tentu masing-masing punya kepentingan berbeda. Dan, jika terdapat banyak kekuatan maka secara otomatis konflik kepentingan juga akan banyak.

Sebagai salah satu parpol pendukung pemerintah, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak khawatir dengan hasil survei yang memperlihatkan bahwa pamor pemerintahan SBY melorot. Menurut Jurubicara DPP PKS Suryama M Sastra, popularitas tinggi tidak ada gunanya jika tidak bekerja. Suryama menilai opini masyarakat terhadap pemerintah bisa berubah-ubah tergantung situasi dan kondisi saat survei dilakukan, opini bisa dibangun dan diruntuhkan.

Sedangkan menurut Effendy Ghazali, ahli komunikasi politik Universitas Indonesia, pemerintahan sekarang sama sekali tidak mengakomodasi prinsip komunikasi politik yang baik. Indikasinya, banyak kebijakan tidak tersampaikan kepada publik dan banyak istilah yang sebenarnya tidak perlu diucapkan, tapi malah terus diumbar. Seharusnya lingkungan istana memiliki ahli komunikasi untuk mengarahkan.

Kecenderungan di Indonesia bisa diterjemahkan dengan teori ilmu komunikasi politik paling mutakhir, yang didasarkan prinsip 3C. Yakni, konsumerisme, selebritas, dan sinisisme. Lugasnya, saat ini media nasional memberikan ruang lebar bagi banyak berita yang dimunculkan kalangan istana untuk menyenangkan konsumen, dalam hal ini adalah rakyat, bahwa pemerintah seakan-akan sudah bekerja keras. Pesan-pesan itu belakangan dilakukan sejumlah menteri dan pejabat pemerintah hingga memunculkan selebritisasi yang hampa makna.

Strategi itu memang terkait erat dengan politik pencitraan. Tetapi, berita dan pesan pemerintah yang umumnya berisi janji itu ternyata banyak yang tidak terlaksana. Akhirnya, muncullah benih sinisme publik. Kecenderungan itu jelas terjadi di Indonesia. Semestinya, jika seseorang telah dipilih

oleh publik, dia harus bisa menjalankan komunikasi pemerintahan bersama publik tanpa takut hingga harus membagi-bagi kursi pemerintahan kepada partai. Jadi, pokoknya ramai-ramai walaupun tidak profesional.

Contoh konkret selebritas kosong itu antara lain banyak perilaku lucu yang dilakukan presiden kita. Misalnya, ada kapal Senopati tenggelam, lalu presiden datang ke pelabuhan dan menaiki kapal dengan memeragakan diri memakai pelampung. Tapi, sesudah itu, malah kapal Levina tenggelam. Jadi, apa yang dikerjakan presiden itu terlihat tidak banyak manfaatnya.

Faktor mendasar yang mengakibatkan degradasi politik pencitraan antara lain dalam ilmu kehumasan modern kita mengidealkan berlakunya pola pemberdayaan berupa *working with the people*. Tapi, sekarang yang diciptakan adalah *working for the people*. Jubir Andi Mallarangeng dan presiden sendiri sering bilang *the government never sleep*. Mereka tak pernah tidur untuk merumuskan agenda perubahan. Itu konsep *working for the people*. Artinya, pemerintah tidak berusaha memberdayakan masyarakat untuk bekerja bersama-sama membangun peradaban baru melalui perubahan mendasar.

Kritik keran pun dituai pemerintahan SBY-JK seputar rencana reshuffle terbatas yang oleh Effendi Ghazali dikatakan sebagai hanya akan menimbulkan implikasi yang tidak signifikan. Bahkan, tampaknya reshuffle terbatas itu hanya dilakukan sebagai konsumsi media dan pencitraan untuk memberikan harapan baru akan terjadinya perubahan. Tetapi, pola reshuffle kabinet memang sulit dipahami karena memang tidak ada ukuran kinerja yang menjadi alasan penggantian. Jika presiden melakukan proses *fit and proper test*, itu hanya sebatas selebriti media.

Reshuffle terbatas ini tidak akan memberikan efek terhadap perbaikan kinerja lokomotif Indonesia Bersatu. Dibanding reshuffle, Festival Film Indonesia (FFI) justru lebih mending karena memiliki ukuran dan standar penilaian yang relatif lebih jelas. Reshuffle kabinet, terkadang tidak masuk akal. Misalnya, Abu Rizal Bakrie yang semula menteri koordinator perekonomian dialih menjadi Menko Kesra. Jadi, langkah-langkah itu sekadar tuntutan politik pencitraan dan tekanan konsumerisme media.

SBY tampaknya ingin bertahan dengan membangun citra dan lebih banyak melakukan hal seremonial dan simbolik. Keberhasilan SBY mencitrakan dirinya sebagai tokoh yang bekerja

keras, santun, responsif, dan manusiawi menghasilkan persepsi SBY adalah presiden yang bijak dan tidak dapat disalahkan. Kegagalan pemerintahan adalah kegagalan pembantunya, apakah itu wakil presiden atau menternya. Politik pencitraan SBY berhasil memisahkan antara dirinya dan pembantunya. Kalaupun kebijakan tidak jalan, rakyat tetap mempunyai persepsi: SBY telah bekerja keras untuk rakyat. Karena itu, tak mengherankan kalau pembantunya juga berlomba-lomba membangun citra di media massa agar tidak ketinggalan dengan pemimpinnya, dan pencitraan sekaligus ingin menunjukkan kepada presiden bahwa mereka juga bekerja keras.

III. PENUTUP

Pencitraan politik dapat dikatakan sebagai ruh dan garda terpenting dalam *public relations* sebuah lembaga dan atau figur politik dalam mempresentasikan diri ke publik. Muara dari pencitraan adalah hubungan komunikasi politik dengan publik yang tak terpisahkan. Komunikasi berarti pengoordinasian makna antara seseorang dengan khalayak, saling berbagi unsur-unsur perilaku, atau modus kehidupan, melalui perangkat-perangkat aturan; penyesuaian pikiran, penciptaan pikiran, simbol bersama di dalam pikiran.

Pembicaraan politik menjadi poin penting dalam pembentukan citra politik, sekaligus merupakan wacana dinamik dari kekuasaan, pengaruh, dan kewenangan yang mendamaikan pertikaian melalui kegiatan simbolik (kata-kata politik). Dimensi penting dari pembicaraan politik adalah untuk perolehan material, peningkatan status, dan identitas personal. Ketiga hal ini bila disederhanakan merupakan alat penting untuk mencapai citra politik yang bertujuan untuk meyakinkan dan membangkitkan massa.

Pustaka

- Fill, Chris, *Marketing Communication, 2nd Edition*, Prentice Hall, NJ: 2000
- McLuhan, Eric & Frank Zingrone, *Essential McLuhan*, Routledge, London: 1995
- Nimmo, Dan, *Political Communication and Public Opinion in America*, penerjemah Tjun Surjaman, Cet. Ke-3, Rosdakarya, Bandung: 1999
- Hasil Survey Lingkaran Survey Indonesia (LSI), *Popularitas Pemerintahan SBY-Kalla*, Maret 2007